

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai 1
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601 Fax. (022) 6642036
Cimahi 40513

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Tahun 2021 dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2017-2022. Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2021 berisi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP yang akan dilaksanakan pada triwulan akhir Tahun Anggaran 2021.

Semoga Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2021 ini dapat menjadi acuan dalam rangka mencapai sasaran strategis dinas dan meningkatkan kinerja perangkat daerah, sehingga DPMPTSP Kota Cimahi dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Cimahi, September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP.19660214 199202 2 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB 2 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN 5

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) TAHUN 2020 5

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Samapai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah..... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 16

2.4. Review Terhadap RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB 3 37

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

BAB 4 49

PENUTUP 49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Namun dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan Renja menjadi tidak sesuai, sehingga memerlukan penyesuaian. Oleh karenanya, disusunlah Renja Perubahan untuk menjadi acuan pelaksanaan anggaran setelah dilakukan evaluasi. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan DPMPTSP untuk periode setelah evaluasi dilakukan hingga tahun anggaran berkenaan berakhir.

Renja Perubahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) yang menjadi dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD-P dan APBN-P. Oleh karenanya Dokumen Renja Perubahan merupakan hasil dari suatu proses pemikiran strategis untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dan isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan OPD. Untuk itu, OPD harus memiliki kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perubahan DPMPTSP Kota Cimahi berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karenanya dengan penyusunan Renja Perubahan ini diharapkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kota Cimahi dapat meningkat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 adalah untuk menghasilkan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kota Cimahi serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Cimahi untuk triwulan akhir Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terbentuk komitmen dalam peningkatan kinerja organisasi.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kota Cimahi ini adalah sebagai dokumen resmi yang memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi untuk triwulan akhir Tahun Anggaran 2021, yang selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 4 PENUTUP

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra DPMPTSP yang telah disusun, maka indikator sasaran strategis DPMPTSP adalah “Nilai realisasi investasi” sebesar Rp. 7.170.150.000.000,00 dan “Indeks kepuasan masyarakat (IKM)” sebesar 83. Berdasarkan Renja DPMPTSP 2021, sasaran strategis ini diupayakan dicapai dengan mengampu 5 (lima) program dan di dalamnya tercakup 15 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.782.462.934,00 yang dibagi dengan komposisi Belanja Operasi sebesar Rp. 15.345.606.334,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 23.436.856.000,00.

Capaian realisasi dan kinerja dari semua kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
SKPD / BAGIAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TRIWULAN II TAHUN 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun.....)	
							I		II					
1	2	3	4	5			6		7		8		9	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Realisasi Investasi	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan											
		KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	3	Jenis	1,218,458,400	3	73,863,770	3	121,198,236	3	195,062,006	100	16.01
1		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perwal Perizinan	1	Perwal	226,507,400	0	18,021,954	0	33,449,262	1	51,471,216	100	22.72

			Jumlah Dokumen Rencana Teknis	2	Dokumen		0		0		0		0	
2		SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	1	Dokumen	102,048,300	0	13,852,154	0	41,817,381	0	55,669,535	0	54.55
3		SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1	Dokumen	122,434,700	0	17,847,308	0	34,112,562	0	51,959,870	0	42.44
4		SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Launching MPP	1	Kegiatan	767,468,000	0	24,142,354	0	11,819,031	0	35,961,385	0	4.69
			Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS	4	Kali		1		1		2		50	
		PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												

		KEGIATAN: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin yang dapat Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	46.88	Persen	752,581,000	46.88	15,148,708	46.88	29,037,093	46.88	44,185,800	100	5.87
5		SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	2	Aplikasi	752,581,000	0	15,148,708	0	29,037,093	0	44,185,800	0	5.87
			Jumlah Konten Media Informasi	2	Konten		0		0		0		0	
		PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
		KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	1	Dokumen	150,000,000	0	6,250,000	0	18,080,000	0	24,330,000	0	16.22
6		SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	1	Dokumen	150,000,000	0	6,250,000	0	18,080,000	0	24,330,000	0	16.22

		KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	7	Fasilitas	232,499,600	6	82,574,600	0	54,340,000	6	136,914,600	85.71429	58.89
7		SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	1	Dokumen	146,689,000	0	73,939,000	0	46,150,000	0	120,089,000	0	81.87
8		SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah SK/Perwal Perizinan	1	Perwal	85,810,600	1	8,635,600	0	8,190,000	1	16,825,600	100	19.61
			Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	5	SOP		5		0		5		100	
		PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												

		KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Kegiatan	462,562,000	1	17,530,500	1	128,870,000	2	146,400,500	66.66667	31.65
9		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	1	Dokumen	48,050,400	0	6,941,900	0	6,030,000	0	12,971,900	0	27.00
10		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	1	Dokumen	285,957,500	1	5,520,000	0	103,384,000	1	108,904,000	100	38.08
11		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	2	Kali	128,554,100	0	5,068,600	1	19,456,000	1	24,524,600	50	19.08
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												

		KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	Bulan	50,400,000	3	4,994,400	3	-	6	4,994,400	50	9.91
12		SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	3	Unit	50,400,000	1	4,994,400	0	-	1	4,994,400	33.33333	9.91
			Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	2	Unit		1		0	-	1		50	
		KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	60	Orang	65,600,000	60	63,575,000	0	712,500	60	64,287,500	100	98.00
13		SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	1	Kegiatan	65,600,000	1	63,575,000	0	712,500	1	64,287,500	100	98.00
		KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	2	Dokumen	6,978,552,400	1	1,357,811,892	1	1,359,060,174	2	2,716,872,066	100	38.93
14		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	6,013,800	1	-	0	-	1	-	100	0
15		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	Dokumen	6,047,600	0	-	1	718,500	1	718,500	100	11.88

16		SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	48	Orang	6,966,491,000	48	1,357,811,892	48	1,358,341,674	48	2,716,153,566	100	38.99
		KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	Bulan	7,157,858,200	3	20,511,554	3	247,454,516	6	267,966,070	50	3.74
17		SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan	167,000,000	3	500,000	3	4,350,000	6	4,850,000	50	2.90
18		SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	12	Bulan	320,945,000	3	7,073,500	3	29,317,200	6	36,390,700	50	11.34
19		SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	151,810,200	3	623,700	3	78,195,000	6	78,818,700	50	51.92
20		SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	406	buah	127,357,900	0	5,584,354	0	8,579,031	0	14,163,385	0	11.12
21		SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan	6,215,795,100	3	-	3	78,686,500	6	78,686,500	50	1.27
			Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	327	Unit		0		0		0		0	
22		SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	174,950,000	3	6,730,000	3	48,326,785	6	55,056,785	50	31.47

		KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	Bulan	579,380,000	3	12,750,679	3	12,993,281	6	25,743,960	50	4.44
23		SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	12	Bulan	452,020,000	3	-	3	-	6	-	50	0.00
			Jumlah gedung yang dipelihara	1	Gedung		0		0		0	-	0	0.00
24		SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	5	Unit	127,360,000	5	12,750,679	5	12,993,281	5	25,743,960	100	20.21
		KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	Bulan	19,166,427,234	3	-	3	86,000,000	6	86,000,000	50	0.45
25		SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	1	interior gedung	19,166,427,234	0	-	0	86,000,000	0	86,000,000	0	0.45
			Jumlah Gedung yang Disewa	2	Unit		0		1		1		50	
		KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	Bulan	1,741,377,000	3	82,336,091	3	98,205,482	6	180,541,573	50	10.37

26		SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	Bulan	1,248,000,000	3	73,251,737	3	74,142,451	6	147,394,188	50	11.81
27		SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	12	Bulan	483,377,000	3	5,194,354	3	24,063,031	6	29,257,385	50	6.05
28		SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	10,000,000	3	3,890,000	3	-	6	3,890,000	50	38.90
		KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	13	Dokumen	226,767,100	6	11,944,354	2	21,721,031	8	33,665,385	61.53846	14.85
29		SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM	1	Dokumen	199,006,700	1	7,674,354	0	15,060,031	1	22,734,385	100	11.42
			Jumlah Dokumen LKIP	1	Dokumen		1		0		1		100	
			Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD	1	Dokumen		1		0		1		100	
			Jumlah Dokumen Monev Triwulanan	4	Dokumen		1		1		2		50	
			Sertifikasi ISO	1	Dokumen		0		0		0		0	
30		SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	2	Dokumen	27,760,400	1	4,270,000	0	6,661,000	1	10,931,000	50	39.38
			Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen		0		1		1		100	

			Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	Dokumen		0		0		0		0	
			Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1	Kegiatan		1		0		1		100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Tolak ukur keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah terealisasinya kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan baik jadwal maupun besaran anggaran sesuai dengan DPA, sehingga sasaran strategis dinas yang ditetapkan dapat dicapai.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja masih dibawah 50% hal ini dikarenakan beberapa target dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4, dan hanya beberapa sub kegiatan yang capaian kinerjanya sudah di atas 50%, yaitu :

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
3. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
4. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Sedangkan fungsi DPMPTSP Kota Cimahi adalah :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman. MPP adalah salah satu bentuk konkrit pengejawantahan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. MPP memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

1. untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
2. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan adanya Permen PANRB tersebut, DPMPTSP Kota Cimahi memiliki prioritas terkait MPP Kota Cimahi, sementara pembangunannya terus berjalan, pembukaan MPP Kota Cimahi direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan MPP menjadi prioritas DPMPTSP hingga MPP bisa terselenggara.

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renja DPMPTSP Kota Cimahi dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DPMPTSP, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikator yang disediakan untuk DPMPTSP berdasarkan RKPD. Rancangan awal RKPD Perubahan perlu untuk di-review untuk dapat mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum atau belum sesuai.

Berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan :

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Indikatif
I	PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	1 Kebijakan	382,499,600	PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	1 Dokumen	392,499,600
	KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	1 Dokumen	150,000,000	KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	1 Dokumen	160,000,000
1	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	1 Dokumen	150,000,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	1 Dokumen	150,000,000

	KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	7 Fasilitas	232,499,600	KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	7 Fasilitas	232,499,600
2	SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	1 Dokumen	146,689,000	SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	1 Dokumen	146,689,000
3	SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah SK/Perwal Perizinan	1 Perwal	85,810,600	SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah SK/Perwal Perizinan	1 Perwal	85,810,600

		Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	5 SOP			Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	5 SOP	
II	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai dengan Standar Pelayanan	3 Jenis Izin	1,218,458,400	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai dengan Standar Pelayanan	3 Jenis Izin	1,218,458,400
	KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	64 Izin dan Non Izin	1,218,458,400	KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	64 Izin dan Non Izin	1,218,458,400
4	SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	1 Dokumen	102,048,300	SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	1 Dokumen	102,048,300

5	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perwal Perizinan	1 Perwal	226,507,400	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perwal Perizinan	1 Perwal	226,507,400
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis	2 Dokumen			Jumlah Dokumen Rencana Teknis	2 Dokumen	
6	SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	122,434,700	SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	122,434,700

7	SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Launching MPP	1 Kegiatan	767,468,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Launching MPP	1 Kegiatan	767,468,000
		Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS	4 Kali			Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS	4 Kali	
III	PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	250 Perusahaan	462,562,000	PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	250 Perusahaan	452,562,000

	KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan	462,562,000	KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan	452,562,000
8	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	1 Dokumen	48,050,400	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	1 Dokumen	48,050,400
9	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	1 Dokumen	285,957,500	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	1 Dokumen	285,957,500

10	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	2 Kali Kegiatan	128,554,100	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	2 Kali Kegiatan	128,554,100
IV	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin yang Dilayani Secara Online	46.88%	752,581,000	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin yang Dilayani Secara Online	46.88%	752,581,000
11	SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	2 Aplikasi	752,581,000	SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	2 Aplikasi	752,581,000

		Jumlah Konten Media Informasi	2 Konten			Jumlah Konten Media Informasi	2 Konten	
V	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	35,966,361,934	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	35,966,361,934
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	80%			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	80%	

	KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	50,400,000	KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	50,400,000
12	SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	3 Unit	50,400,000	SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	3 Unit	50,400,000
		Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	2 Unit			Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	2 Unit	
	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	60 Orang	65,000,000	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	60 Orang	
13	SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	1 Kegiatan	65,600,000	SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	1 Kegiatan	65,600,000

	Undangan							
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	2 Dokumen	6,978,552,400	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	2 Dokumen	6,978,552,400
14	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	6,013,800	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	6,013,800
15	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	6,047,600	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	6,047,600

16	SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	48 Orang	6,966,491,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	48 Orang	6,966,491,000
	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	7,157,858,200	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	7,157,858,200
17	SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	167,000,000	SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	167,000,000

18	SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	12 Bulan	320,945,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	12 Bulan	320,945,000
19	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	151,810,200	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	151,810,200
20	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	406 Buah	127,357,900	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	406 Buah	127,357,900

21	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	6,215,795,100	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	6,215,795,100
		Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	327 Unit			Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	327 Unit	
22	SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	174,950,000	SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	174,950,000
	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	579,380,000	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	579,380,000

23	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	12 Bulan	452,020,000	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	12 Bulan	452,020,000
		Jumlah gedung yang dipelihara	1 Buah			Jumlah gedung yang dipelihara	1 Buah	
24	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	5 Unit	127,360,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	5 Unit	127,360,000
	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	19,166,427,234	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	19,166,427,234

25	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	1 Interior Gedung	19,166,427,234	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	1 Interior Gedung	19,166,427,234
		Jumlah Gedung yang Disewa	2 Buah			Jumlah Gedung yang Disewa	2 Buah	
	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	1,741,377,000	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12 Bulan	1,741,377,000
26	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan	1,248,000,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan	1,248,000,000

27	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	12 Bulan	483,377,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	12 Bulan	483,377,000
28	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	13 Dokumen	226,767,100	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	13 Dokumen	226,767,100
29	SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM	1 Dokumen	199,006,700	SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM	1 Dokumen	199,006,700
		Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen			Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD	1 Dokumen			Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD	1 Dokumen	

		Sertifikasi ISO	1 Sertifikat			Sertifikasi ISO	1 Sertifikat	
30	SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	2 Dokumen	27,760,400	SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	2 Dokumen	27,760,400
		Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	
		Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 Kegiatan			Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dimulai dengan adanya usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan berjenjang dari oleh Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di Kota/Kabupaten. Hasil dari musrenbang kemudian diakomodir oleh Perangkat Daerah yang terkait. Begitu juga dengan DPMPTSP Kota Cimahi yang mengakomodir usulan masyarakat yang merupakan hasil dari musrenbang. Berikut disajikan tabel yang memuat hasil usulan musrenbang yang diakomodir oleh DPMPTSP Kota Cimahi:

**DAFTAR KELOMPOK USULAN
PRIORITAS MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN CIMAHI SELATAN
TAHUN 2021**

No	Kelompok Usulan	Lokasi	Pagu Usulan (Rp.)	Keterangan
1	Mempermudah perijinan dan pemberian label halal dan PIRT (Produksi Ijin Rumah Tangga) dan BP POM	Kelurahan Cibeureum RW 17	329,750,000	Diterima
2	Kemudahan izin usaha bagi masyarakat	Kelurahan Cibeureum RW 15, Kelurahan Melong RW 01-06	273,020,000	Diterima
3	Pembuatan IMB Gratis	Kelurahan Cibeureum RW 03	10,250,000	Diterima

BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja DPMPTSP untuk semester kedua Tahun 2021 akan tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di awal, baik program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Berikut Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Tahun 2021 yang telah disusun sesuai dengan analisis yang telah dilakukan :

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

KOTA CIMAHI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
I	PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	382,499,600	392,499,600	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	392,499,600	
	KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	160,000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	150,000,000	
1	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	160,000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	150,000,000	Pengusulan Pengalihan Anggaran Rp 10.000.000,00 dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

	KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	Kota Cimahi	Kota Cimahi	7 Fasilitas	7 Fasilitas	232,499,600	232,499,600	APBD KOTA	APBD KOTA	7 Fasilitas	232,499,600	
2	SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	146,689,000	146,689,000	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	146,689,000	
3	SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah SK/Perwal Perizinan	Jumlah SK/Perwal Perizinan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Perwal	1 Perwal	85,810,600	85,810,600	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Perwal	85,810,600	
		Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	Kota Cimahi	Kota Cimahi	5 SOP	5 SOP					5 SOP		
II	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai dengan Standar Pelayanan	Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai dengan Standar Pelayanan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	3 Jenis Izin	3 Jenis Izin	1,218,458,400	1,218,458,400	APBD KOTA	APBD KOTA	3 Jenis Izin	1,218,458,400	

	KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	Kota Cimahi	Kota Cimahi	64 Izin dan Non Izin	64 Izin dan Non Izin	1,218,458,400	1,218,458,400	APBD KOTA	APBD KOTA	64 Izin dan Non Izin	1,218,458,400	
4	SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	102,048,300	102,048,300	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	102,048,300	
5	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perwal Perizinan	Jumlah Perwal Perizinan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Perwal	1 Perwal	226,507,400	226,507,400	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Perwal	226,507,400	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis	Jumlah Dokumen Rencana Teknis	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen		
6	SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	122,434,700	122,434,700	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	122,434,700	
7	SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Launching MPP	Jumlah Launching MPP	Kota Cimahi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	767,468,000	767,468,000	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Kegiatan	767,468,000	

	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
		Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS	Kota Cimahi		4 Kali	4 Kali					4 Kali		
III	PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Kota Cimahi	Kota Cimahi	250 Perusahaan	250 Perusahaan	462,562,000	452,562,000	APBD KOTA	APBD KOTA	250 Perusahaan	452,562,000	
	KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Cimahi	Kota Cimahi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	462,562,000	452,562,000	APBD KOTA	APBD KOTA	3 Kegiatan	452,562,000	
8	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	48,050,400	48,050,400	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	48,050,400	
9	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	285,957,500	285,957,500	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	285,957,500	

10	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	128,554,100	118,554,100	APBD KOTA	APBD KOTA	2 Kali Kegiatan	128,554,100	Pengusulan Pengalihan Anggaran Rp 10.000.000,00 ke Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin yang Dilayani Secara Online	Persentase Jenis Izin yang Dilayani Secara Online	Kota Cimahi	Kota Cimahi	46.88%	46.88%	752,581,000	752,581,000	APBD KOTA	APBD KOTA	46.88%	752,581,000	
11	SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	752,581,000	752,581,000	APBD KOTA	APBD KOTA	2 Aplikasi	752,581,000	
		Jumlah Konten Media Informasi	Jumlah Konten Media Informasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Konten	2 Konten					2 Konten		
V	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	BB	BB	35,966,361,934	35,966,361,934	APBD KOTA	APBD KOTA	BB	35,966,361,934	

		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum			100%	100%					100%		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			80%	80%					80%		
	KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	50,400,000	50,400,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	50,400,000	
12	SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	3 Unit	3 Unit	50,400,000	50,400,000	APBD KOTA	APBD KOTA	3 Unit	50,400,000	
		Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Unit	2 Unit					2 Unit		
	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	Kota Cimahi	Kota Cimahi	60 Orang	60 Orang	65,000,000	65,000,000			60 Orang		
13	SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65,600,000	65,600,000	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Kegiatan	65,600,000	

	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Dokumen	2 Dokumen	6,978,552,400	6,978,552,400	APBD KOTA	APBD KOTA	2 Dokumen	6,978,552,400	
14	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	6,013,800	6,013,800	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	6,013,800	
15	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	6,047,600	6,047,600	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	6,047,600	
16	SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	48 Orang	48 Orang	6,966,491,000	6,966,491,000	APBD KOTA	APBD KOTA	48 Orang	6,966,491,000	
	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	7,157,858,200	7,157,858,200	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	7,157,858,200	
17	SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	167,000,000	167,000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	167,000,000	

18	SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	320,945,000	320,945,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	320,945,000	
19	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	151,810,200	151,810,200	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	151,810,200	
20	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	Kota Cimahi	Kota Cimahi	406 Buah	406 Buah	127,357,900	127,357,900	APBD KOTA	APBD KOTA	406 Buah	127,357,900	
21	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	Jumlah bulan penyediaan ATK	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	6,215,795,100	6,215,795,100	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	6,215,795,100	
		Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	Kota Cimahi	Kota Cimahi	327 Unit	327 Unit					327 Unit		
22	SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	174,950,000	174,950,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	174,950,000	

	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	579,380,000	579,380,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	579,380,000	
23	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	452,020,000	452,020,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	452,020,000	
		Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara			1 Buah	1 Buah					1 Buah		
24	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	5 Unit	5 Unit	127,360,000	127,360,000	APBD KOTA	APBD KOTA	5 Unit	127,360,000	
	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	19,166,427,234	19,166,427,234	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	19,166,427,234	
25	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Interior Gedung	1 Interior Gedung	19,166,427,234	19,166,427,234	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Interior Gedung	19,166,427,234	
		Jumlah Gedung yang Disewa	Jumlah Gedung yang Disewa	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Buah	2 Buah					2 Buah		

	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	1,741,377,000	1,741,377,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	1,741,377,000	
26	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	1,248,000,000	1,248,000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	1,248,000,000	
27	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	483,377,000	483,377,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	483,377,000	
28	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 Bulan	10,000,000	
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	13 Dokumen	13 Dokumen	226,767,100	226,767,100	APBD KOTA	APBD KOTA	13 Dokumen	226,767,100	
29	SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM	Dokumen Survey IKM	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen	199,006,700	199,006,700	APBD KOTA	APBD KOTA	1 Dokumen	199,006,700	
		Jumlah Dokumen LKIP	Jumlah Dokumen LKIP			1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		

		Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD	Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD			1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Money Triwulanan	Jumlah Dokumen Money Triwulanan			4 Dokumen	4 Dokumen					4 Dokumen		
		Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO			1 Sertifikat	1 Sertifikat					1 Sertifikat		
30	SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Dokumen	2 Dokumen	27,760,400	27,760,400	APBD KOTA	APBD KOTA	2 Dokumen	27,760,400	
		Jumlah Dokumen Renja	Jumlah Dokumen Renja			1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	Jumlah Dokumen Renja Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen		
		Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan					1 Kegiatan		

BAB 4

PENUTUP

Di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2021 sampai dengan triwulan II serta Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021. Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta merupakan pedoman dalam penyusunan RKA tahun 2021 sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Perubahan ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam urusan penanaman modal di Kota Cimahi khususnya dalam pelayanan perizinan serta sejauh mana kinerja, kontribusi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan bagian dari rencana kerja ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2017-2022. Di masa mendatang akan selalu diupayakan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang lebih baik. Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tentunya harus terus diupayakan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan koordinasi dengan dinas teknis untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan Rencana Kerja Perubahan yang disusun ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021 agar dapat mencapai target kinerja 1 (satu) tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra, melalui komitmen dari seluruh pegawai DPMPTSP Kota Cimahi.